

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Biologis)*. Jakarta : Toko Gunung Agung.
- Bilas, Richard A. 1995. *Ekonomi Mikro*. Terjemahan : Gunawan Hutauruk. Jakarta : Erlangga.
- Damsar dan Indrayani. 2015. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta : Kencana.
- Dinas PPKUKM. 2019. *Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2020-2022*. Jakarta : Dinas PPKUKM.
- , 2020. *Laporan Kinerja Instansi (LKIP) 2020*. Jakarta : Dinas PPKUKM
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu
- Harjono. 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Mahkamah Konstitusi.
- Jaya, Wihana Kirana. 2008. *Ekonomi Industri*. Yogyakarta : BPFE.
- Kansil, C.S.T. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Keraf, Sonny. 1998. *Etika Bisnis Hukum Dan Relevansinya*. Yogyakarta : Kanisius.
- Kotler, Philip. 2000. *Prinsip-Prinsip Pemasaran Manajemen*. Edisi Milenium. Jakarta : Prenhalindo.
- Lubis, Andi Fahmi, dkk. Edisi ke 2. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta : Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Malano, Hermanto. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta : Gramedia.
- Marbun, B.N. 2003. *Kamus Manajemen*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

- Marthin, Said Sa'ad. 2007. *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta : Zikrul Hakim.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB : Mataram Press.
- Mujahidin, Akhmad. 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Puska Dagri, BP2KP, Kemendag. 2015. *Laporan Akhir Analisis Arah Pengembangan Pasar Rakyat*. Jakarta : Puska Dagri.
- Syahrini, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Scherer, F.M. and David Ross. 1990. *Industrial Market Struktur And Economic Performance*. Boston : Houghton Mifflin Company.
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wisa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

B. Peraturan Perundang Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- . Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
- . Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.
- . Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi.

----- . Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2018
Tentang Perpasaran.

----- . Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2009 Tentang Susunan
Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

C. Jurnal / Skripsi

Budiyanti, Eka. 2017. *Dampak Liberisasi Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Kajian Vol. 22 No. 1. Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Sarwoko, Endi. 2008. *Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Kinerja Pedagang Pasar Tradisional Di Wilayah Kabupaten Malang*. Jurnal Ekonomi Modernisasi, Vol. 4 No. 2. Malang : Universitas Kanjuruhan.

Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.

D. Situs / Website

Agustina, Ismaya Dwi. Pengertian Teori. <http://ismayadwiagustina.wordpress.com/2012/11/26/Pengertian-Teori/>.

Badan Pusat Statistik. Direktori Pasar Indonesia 2020. <https://www.bps.go.id/pasar/app/direktori>.

BANK INDONESIA. Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>.

Compas.com. Jenis Jenis Pasar Beserta Contohnya. <https://money.kompas.com/read/2022/01/21/060000226/jenisjenispasarbesertacontohnya#:~:text=Jenis%2Djenis%20pa>

[sar%20menurut%20ruang%20lingkup&text=Misalnya%20pasar%20kelurahan%20atau%20pasar,yang%20berada%20di%20berbagai%20negara.](#)

Dinas PPKUKM. Visi Misi Dinas PPKUKM. Website :
<https://disppkukm.jakarta.go.id/profile/visi-misi>.

Dosen Pendidikan. Pengertian Pasar Menurut Para Ahli. <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-pasar/>.

Dosen Pendidikan 2. Pengertian Pasar Menurut Para Ahli. <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-pasar/>.

Glosarium. Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli (Tesis). <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.

<http://e-journal.uajy.ac.id/11423/3/TA142382.pdf>.

Idtesis.com, Teori Lengkap Pedagang Pasar Tradisional Menurut Para Ahli Dan Contoh. (Tesis) Pedagang Pasar Tradisional. <https://idtesis.com/teori-lengkap-pedagang-pasar-tradisional-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-pedagang-pasar-tradisional/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Modernisasi. <https://kbbi.web.id/modernisasi>.

-----, Perlindungan Hukum. <https://kbbi.web.id/perlindungan>.

-----, Pengertian Pasar. <https://kbbi.web.id/pasar>.

Kompasiana. 2018. <https://www.kompasiana.com/rachmihf/5bc59ec2677ffb450120d3a9/konsep-liberalisasi-dan-privatisasi-di-indonesia-dalam-pasar-global>.

Mauladi, Achmad. Harkat Dan Martabat Manusia. www.kanalinfo.web.id/2016/08/harkat-dan-martabat-manusia.html?m=1.

Rachmi Febian. Konsep Liberisasi Perdagangan dan Privatisasi di Indonesia Dalam Pasar Global. <http://www.PengertianAhli.Com/2014/01/Pengertian-Keadilan-Apa-Itu-Keadilan/>.

Riadi, Muchlisin. Pengertian Aspek Dan Jenis Jenis Persaingan Usaha. <https://www.kajianpustaka.com/2019/12/pengertian-aspek-dan-jenis-jenis-persaingan-usaha.html>.

Sudut Hukum. Perlindungan Hukum. <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum>.

Uddin, Safar. Persaingan Usaha. Conference Paper PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk. Indonesia.

https://www.researchgate.net/publication/359367718_PERSAINGAN_USAHA.

Wikipedia. Persaingan (Ekonomi). [https://id.wikipedia.org/wiki/Persaingan_\(ekonomi\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Persaingan_(ekonomi)).

E. Wawancara

Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta. 2022. Staf Seksi Perdagangan Dalam Negeri
Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta. Jakarta : Zoom (virtual).

Pedagang Pasar Rakyat DKI Jakarta. 2022. Pasar Minggu, Mampang Prapatan Dan Blok
M. Jakarta : Wawancara.

Masyarakat DKI Jakarta. 2022. Jakarta : Kuisisioner (angket).





UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/31/2018
Jl. Sawo Manita No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor: 177/DK-FH/X/2021

tentang

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- | | |
|---------------|---|
| Menimbang | 1. Bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mahasiswa; |
| | 2. Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing skripsi; |
| | 3. Bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan Dekan ini dinilai mampu memenuhi syarat sebagai Dosen pembimbing skripsi; |
| | 4. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Keputusan Dekan. |
| Mengingat | 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; |
| | 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; |
| | 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012; |
| | 4. Statuta Universitas Nasional Tahun 2009; |
| | 5. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 127 tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan di Universitas Nasional. |
| Memperhatikan | Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Bisnis dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 6 Oktober 2020. |
| Menetapkan | MEMUTUSKAN |
| Pertama | Menunjuk dan Menetapkan
Cucuk Endratno, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua |
| Kedua | Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Joni Kurniawan Nazha
Nomor Pokok : 18311233796501478
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASAR TRADISIONAL ATAS PERSAINGAN USAHA DENGAN TOKO MODERN DI WILAYAH DKI JAKARTA MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PERPASARAN SWASTA |
| Ketiga | Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan |
| Keempat | Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| Kelima | Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |
| Keenam | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan |

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Oktober 2021
Dekan

Prof. Dr. Basjki Reksa Wibowo, S.H.,MS

Tembusan:
Disampaikan Kepada Yth:
1. Koordinator PK Hukum Bisnis;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa Berkebutuhan

UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred/IS/2018
Jl. Sawo Manis Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skrripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Joni Kurniawan Nazara
No. Pokok Mahasiswa : 183112330050148
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM PASAR RAKYAT TERHADAP TOKO SWALAYAN DI DAERAH DKI JAKARTA (Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perpasaran)

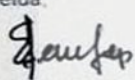
Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skrripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 25 Agustus 2022
Waktu / Ruang : 14.30 - 16.00 / 001/2
Hasil Ujian* : LULUS dengan nilai 82 / setara (A)
Dengan Catatan : Perbaiki terlampir.

Satas Waktunya : 7 hari. Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skrripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 25 Agustus 2022

Penguji:
Ketua, Anggota, Anggota Mahasiswa,

Erma Defiana P., S.H., M.H. Masidin, S.H., M.H. Cucuk Endratno, S.H., M.H. Joni Kurniawan Nazara
Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka = $80 + 81 + 85 = \frac{246}{3} = 82$

Nilai akhir masing-masing Penguji
Jumlah Penguji



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
Jl. Sawo Manilla No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

Nomor : 62/DK-FH/III/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Mendapatkan Bahan Wawancara/data

Kepada Yth :

Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan
menengah
Jl. MI Ridwan Rais No. 5 RT. 7 / RW. 1, Kec. Gambir, Jakarta Pusat

Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini :

Nama : Joni Kurniawan Nazara
No. Pokok : 183112330050148
Program Studi : Ilmu Hukum
No. Telepon : 081290205860
E mail : nazarajoni32@gmail.com
Alamat : Jl.Raya Ps.Minggu No.9A Kec.Ps.Minggu

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, dan berdasarkan Peraturan Fakultas Hukum Universitas Nasional untuk memenuhi persyaratan kelulusan mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai Tugas Akhir dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM PASAR TRADISONAL TERHADAP TOKO MODERN MENURUT PERATURAN DAERAH WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2018

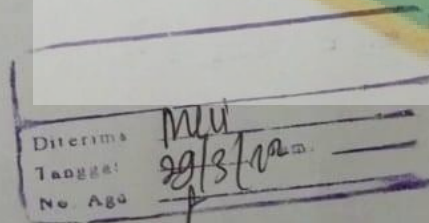
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan Mendapat Bahan wawancara/data diperlukan oleh mahasiswa tersebut dalam rangka penyusunan skripsi sarjana strata satu.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian, bantuan dan kerjasama dari Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Jakarta, Maret 2022

Dekan
Ub,Wakil Dekan

Dr.Mustakim.,S.H.,M.H



Tembusan Disampaikan Yth:

- 1.Dekan (sebagai laporan)
- 2.Arsip



Nomor : e-0056/KG.04.00 5 April 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Permohonan Mendapatkan Bahan Wawancara/data Kepada Yth. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional di

Jakarta

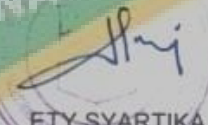
Memperhatikan surat Nomor 62/DK-FH/III/2022 Tanggal 29 Maret 2022 Hal Permohonan Mendapatkan Bahan Wawancara/data, dengan ini disampaikan pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima mahasiswa/i :

Nama : Joni Kurniawan Nazara
NIM : 183112330050148
Jurusan/Program : Ilmu Hukum

untuk melaksanakan penelitian di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta. Adapun waktu agar menyesuaikan dengan ketentuan jam kerja yang berlaku pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi DKI
Jakarta
Sekretaris Dinas


ETY-SYARTIKA
NIP 196707061993032020

Tembusan :
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
Provinsi DKI Jakarta sebagai Laporan

**Foto Wawancara Dengan Dinas PPKUM, Pengelola Pasar Rakyat Dan Pedagang
Pasar Rakyat**



Wawancara Dengan Dinas PPKUM



Wawancara Dengan Pengelola Pasar Rakyat Mampang Prapatan



Wawancara Dengan Pedagang Pasar Rakyat Pasar Minggu

Pertanyaan Wawancara

Wawancara Dinas PPKUKM

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi Pasar Rakyat tidak mampu bersaing dengan toko modern (internal dan eksternal) ?

Jawaban : keberadaan Toko Swalayan tidak membawa pengaruh terhadap Pasar Rakyat karena kedua sarana perpasaran ini memiliki pangsa pasarnya masing-masing.

2. Kontribusi Pasar Rakyat dan Toko Swalayan terhadap Daerah di wilayah DKI Jakarta?

Jawaban : kedua sarana perpasaran ini bersama-sama meningkatkan sektor ekonomi dalam DKI Jakarta dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat DKI Jakarta.

3. Pelaku usaha kecil dan menengah yang harus gulung tikar akibat kalah bersaing dengan toko swalayan ?

Jawaban : sebelum mendirikan Toko Swalayan, kita mintakan analisis sosial ekonomi masyarakat dan pengaruh pendirian terhadap Pasar Rakyat serta apa yang dapat dilakukan dalam mengembangkan Pasar Rakyat kedepan. Sehingga, dirasa tidak ada Pasar Rakyat yang gulung tikar karena alasan kalah bersaing dengan Toko Swalayan.

4. Bentuk Perlindungan Hukum apa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah selaku regulator terhadap pasar rakyat untuk terus bertahan ?

Jawaban : sesuai dengan isi Perda nomor 2 Tahun 2018 tentang perpasaran, kita mulai bina dan dampingi setiap pendirian sarana perpasaran pada saat pelaku usaha ingin mendapatkan izin pengelolaan/pendirian usaha. izin tersebut memuat tentang pertimbangan mengenai keberadaan Pasar Rakyat. selanjutnya kita terus monitoring dan lakukan evaluasi agar pelaksanaan aturan dapat berjalan sesuai dengan mestinya.

5. Bagaimana implementasi atas regulasi yang telah ditetapkan dalam rangka melindungi eksistensi Pasar Rakyat ?

Jawaban : implementasinya ialah terus melakukan pengawasan dan pendampingan sarana perpasaran dan melakukan evaluasi jika ada hal yang tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

6. Bagaimana Dinas PPKUKM dalam mengantisipasi pesatnya laju pendirian Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat ?

Jawaban : kita adakan kerjasama kemitraan sebagai bentuk tanggung jawab Toko Swalayan bagi perkembangan Pasar Rakyat, namun dengan prinsip saling menguntungkan.

7. Bagaimana Dinas PPKUKM dapat memastikan bahwa Pasar Rakyat tidak terganggu dengan keberadaan Toko Swalayan ?

Jawaban : dengan kewajiban yang kita bebaskan bagi Toko Swalayan, seharusnya hal tersebut tidak mengganggu keberadaan Pasar Rakyat, melainkan membantu UMKM dan Pasar Rakyat.

8. Bagaimana dengan Pasar Rakyat yang tidak memiliki pengelola atau berdiri secara perorangan ?

Jawaban : yang dapat kita kembangkan dan lindungi ialah pasar-pasar yang telah bekerjasama dengan pemerintah. Artinya mereka mau diatur, dibina dan dampingi oleh Pemerintah Daerah.

9. Apakah Pasar Rakyat tidak berpengelola juga di bina dan diawasi?

Jawaban : Pasar Rakyat yang berdiri sendiri tidak kita bina dan awasi karena kita sejak awal tidak tau tentang usaha mereka dan memang mereka tidak ingin diatur oleh Pemerintah Daerah. Namun meskipun begitu, kita tetap berupaya bagaimana caranya mereka mau kita rangkul.



Wawancara Pedagang Pasar Rakyat

1. Siapa nama pedagang yang melakukan kegiatan usaha di Pasar Rakyat?

Jawaban : Ibu Ermawati

Bapak Muhamad Nuzuly

Bapak Agus Napitupulu

Ibu Desi Umaroh

Ibu Atika Rahmi

2. Di Pasar Rakyat manakah pedagang yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha ?

Jawaban : Pasar Minggu

Pasar Minggu

Pasar Blok M Square

Pasar Mampang Prapatan

Pasar Mampang Prapatan

3. Jenis barang apa yang diperdagangkan oleh pedagang yang bersangkutan ?

Jawaban : sayuran, cabai, bawang, dll.

Kantong kresek, dan kantong sejenis lainnya.

Pakaian

Barang pecah belah

Bumbu dapur

4. Sudah berapa lama pedagang yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha di Pasar Rakyat ?

Jawaban : 10 tahun, 15 Tahun, 10 Tahun, 25 Tahun, 8 Tahun

5. Dari mana pedagang mendapat pasokan barang?

Jawaban : dari luar pada suatu perusahaan tertentu

6. Bagaimana sistem penjualan di Pasar Rakyat, apakah hanya menjual kepada konsumen yang berkunjung langsung ke Pasar Rakyat atau sudah memanfaatkan teknologi seperti, shopee, tokopedia, bukalapak, dll?

Jawaban : hanya sebagian kecil yang memanfaatkan teknologi, karena belum paham tentang teknologi (rata-rata pedagang berusia 40 tahun ke atas)

7. Bagaimana sistem pembayaran yang berlaku di Pasar Rakyat, apakah hanya tunai atau non tunai juga berlaku?

Jawaban : sebagian kecil ada yang menggunakan non tunai, namun karena belum paham teknologi dan biaya admin yang besar oleh bank, kebanyakan pedagang hanya menerima pembayaran secara tunai.

8. Apa saja pengeluaran yang dikeluarkan oleh pedagang dalam Pasar Rakyat terkait pengelolaan pasar?

Jawaban : Iuran pasar, yang memuat kebersihan, listrik dan retribusi tempat. Tarif ini tidak terlalu besar, sesuai dengan pendapatan pedagang.

9. Apakah pengelola telah memenuhi kewajiban seperti yang telah di amanatkan oleh Peraturan Daerah ?

Jawaban : sudah

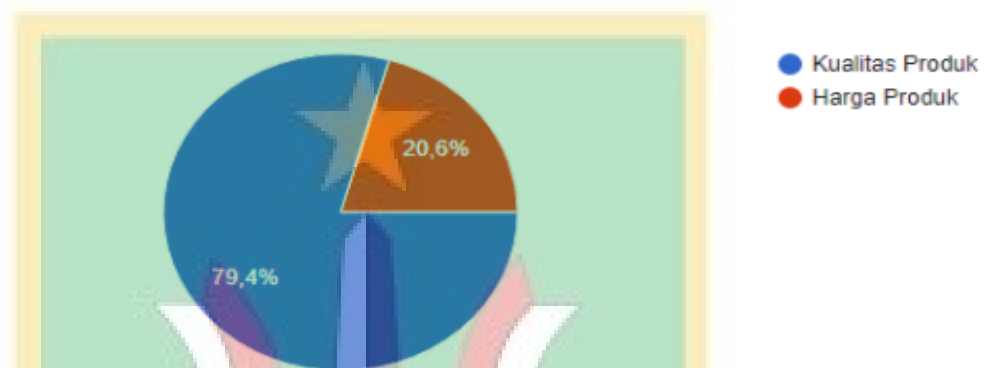
10. Apakah keberadaan Toko Swalayan memiliki dampak untuk pedagang Pasar Rakyat?

Jawaban : untuk sekarang, kita memiliki pembeli tetap sehingga keberadaan Toko Swalayan tidak terlalu berdampak langsung ke pedagang Pasar Rakyat.

Wawancara Masyarakat DKI Jakarta

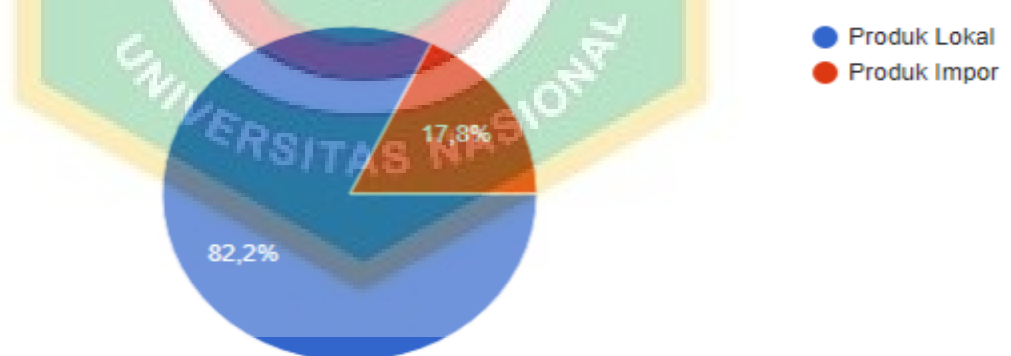
Ketika ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari, mana yang lebih anda perhatikan, kualitas produk atau harga produk?

102 jawaban



Diantara produk lokal dan impor, manakah produk yang lebih anda sukai?

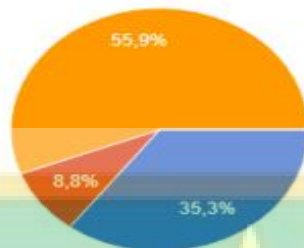
101 jawaban



Menurut anda apakah kualitas produk lokal saat ini dapat bersaing dengan kualitas produk impor?

[Salin](#)

102 jawaban

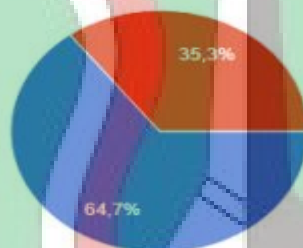


- Ya, kualitas produk lokal dapat bersaing dengan kualitas produk impor
- Belum, kualitas produk impor masih lebih unggul dari produk lokal
- Sebagian produk lokal sudah dapat bersaing dengan produk impor

Ketika berbelanja, apakah anda lebih senang dengan tempat yang nyaman namun harga lebih mahal atau tempat yang kurang nyaman dengan harga lebih murah?

[Salin](#)

102 jawaban

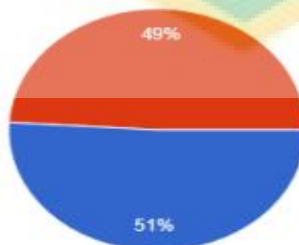


- Tempat yang nyaman dengan harga produk lebih mahal
- tempat yang kurang nyaman dengan harga produk lebih murah

Mana yang lebih anda senang, belanja ditempat yang produknya lebih lengkap dengan harga lebih mahal atau rela mendatangi setiap kios/toko untuk mendapatkan harga yang lebih murah?

[Salin](#)

102 jawaban

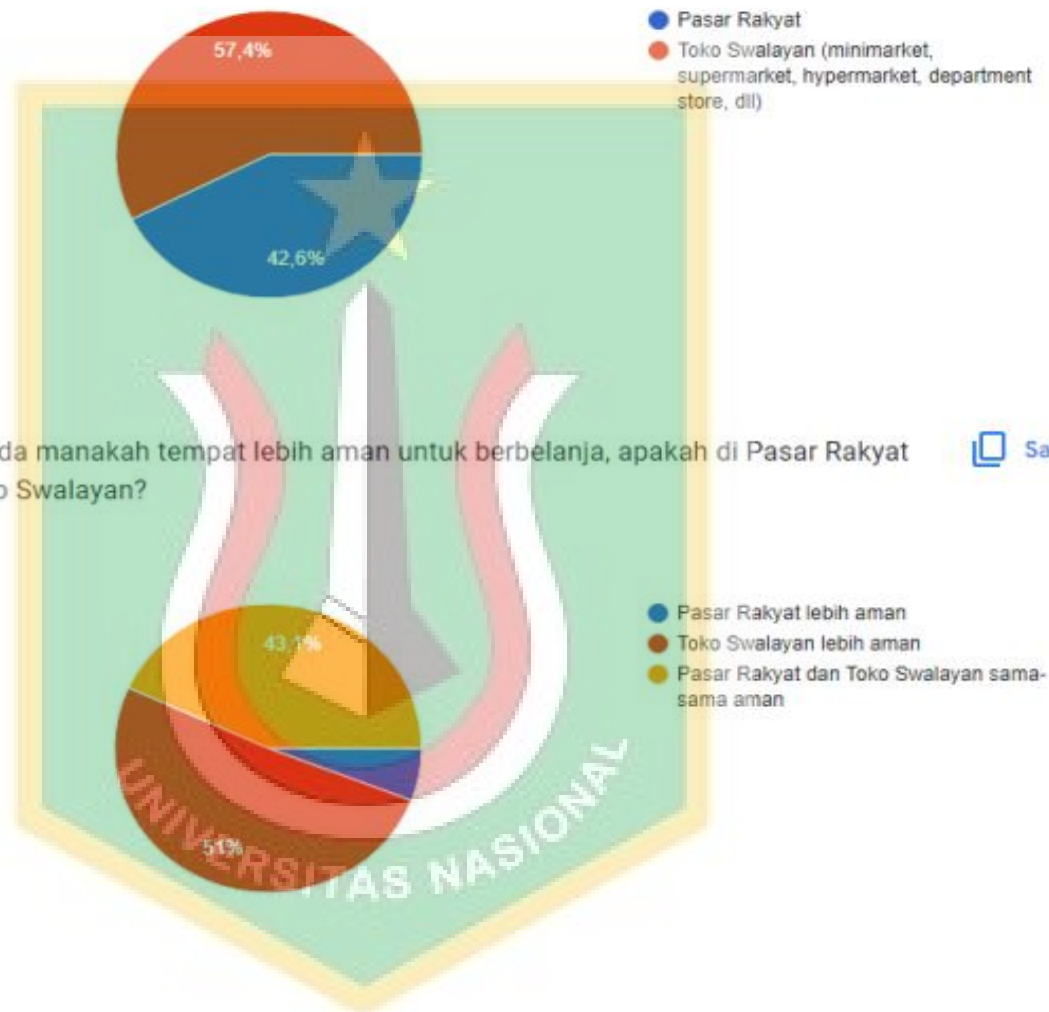


- Belanja ditempat yang produknya lengkap meski harganya lebih mahal
- Rela mendatangi setiap kios/toko untuk mendapatkan produk dengan harga murah

Jika disuruh memilih antara Pasar Rakyat (Pasar PD. Jaya, Pasar Rakyat milik Swasta) dengan Toko Swalayan (minimarket, supermarket, hypermarket, department store, dll), dimanakah tempat anda ingin berbelanja?

[Salin](#)

101 jawaban



Menurut anda manakah tempat lebih aman untuk berbelanja, apakah di Pasar Rakyat atau di Toko Swalayan?

[Salin](#)

102 jawaban



PERLINDUNGAN HUKUM PASAR RAKYAT TERHADAP TOKO SWALAYAN DI WILAYAH DKI JAKARTA (Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perpasaran)

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

28%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	peraturan.bpk.go.id Internet Source	6%
2	disppkukm.jakarta.go.id Internet Source	5%
3	repository.ung.ac.id Internet Source	3%
4	money.kompas.com Internet Source	2%
5	www.dictio.id Internet Source	1%
6	eprints.unram.ac.id Internet Source	1%
7	ppid.bojolali.go.id Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	1%

9	jurnal.dpr.go.id Internet Source	1%
10	www.jogloabang.com Internet Source	1%
11	Www.Jogloabang.Com Internet Source	1%
12	Submitted to City University of New York System Student Paper	1%
13	www.bi.go.id Internet Source	1%
14	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
15	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	1%
16	liya2000.blogspot.com Internet Source	1%
17	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
18	repository.uma.ac.id Internet Source	1%
19	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	1%